

**DAFTAR ISIAN  
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: REMBANG  
Kecamatan: Sananwetan  
Kota: KOTA BLITAR  
Provinsi: JAWA TIMUR  
Bulan: 12  
Tahun: 2023

Nama Pengisi: UMI WIDAWATI, S.Pd  
Pekerjaan: PNS  
Jabatan: Kasi Perekonomian dan Kesejaht

Kepala Desa / Lurah: YULIAN NURDIN AHMAD, S.IP, M.AP  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : Dari RT dan RW  
Referensi 2: Dari Monografi Kelurahan  
Referensi 3: Data Base DISPENDUKCAPIL  
Referensi 4: Data Profil Tahun 2022

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**A. Jumlah Penduduk**

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1591 orang	1679 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1591 orang	1692 orang
Persentase perkembangan	1.46 %	1.92 %

**B. Jumlah Keluarga**

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	898 KK	284 KK	1182 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	886 KK	280 KK	1162 KK
Prosentase Perkembangan	1.85 %	0.72 %	

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

**A. Pengangguran**

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1880 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	45 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	150 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1500 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	183 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	2 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

**B. Kesejahteraan Keluarga**

1. Jumlah keluarga prasejahtera	6 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	54 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	120 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	286 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	716 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1182 keluarga

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

**A. SUBSEKTOR PERTANIAN**

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Padi sawah	0	0	0	0	0	0	0

**B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN**

Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Kacang mede	0	0	0	0	0	0	0
Kelapa	0	0	0	0	0	0	0
Kelapa sawit	0	0	0	0	0	0	0
Kopi	0	0	0	0	0	0	0
Cengkeh	0	0	0	0	0	0	0
Coklat	0	0	0	0	0	0	0
Pinang	0	0	0	0	0	0	0
Karet	0	0	0	0	0	0	0
Tembakau	0	0	0	0	0	0	0
Pala	0	0	0	0	0	0	0
Vanili	0	0	0	0	0	0	0
Jarak pagar	0	0	0	0	0	0	0
Jarak kepyar	0	0	0	0	0	0	0
Kapuk	0	0	0	0	0	0	0
Teh	0	0	0	0	0	0	0

**C. SUBSEKTOR PETERNAKAN**

Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)
Susu	0 962	0	0	0	0
Kulit	0 960	0	0	0	0
Telur	0 960	0	0	0	0
Daging	0 960	0	0	0	0
Madu	0 962	0	0	0	0
Bulu	0 960	0	0	0	0
Air liur burung walet	0 962	0	0	0	0
Hiasan/lukisan	0 1013	0	0	0	0
Cinderamata	0 1013	0	0	0	0

**D. SUBSEKTOR PERIKANAN**

Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan
Gurame	1	25000000	3000000	0	9500000	0

**E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN**

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada	0 jenis

**F. SUBSEKTOR KERAJINAN**

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 750.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 250.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 125.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 300.000.000,00
Total jenis kerajinan rumah tangga	5 jenis

**G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN****G.1. Subsektor Industri Pangan**

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 2.000.000.000,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 900.000.000,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 100.000.000,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 125.000.000,00
Total jumlah jenis industri tsb yang ada	8 jenis

**H. SUBSEKTOR KEHUTANAN**

Total nilai produksi tahun ini	Rp. 0,00
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp. 0,00
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. 0,00
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp. 0,00

**I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN****I.1. Subsektor Perdagangan Besar**

Total nilai transaksi	Rp. 25.000.000.000,00
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp. 17.000.000.000,00
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp. 5,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 550.000.000,00
Total biaya antara lainnya	Rp. 225.000.000,00

**I.2. Subsektor Perdagangan Eceran**

Jumlah total jenis perdagangan eceran	10 jenis
Total nilai transaksi	Rp. 5.500.000.000,00
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. 2.000.000.000,00
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp. 10.000.000.000,00

**I.3. Subsektor Hotel**

Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	0 jenis
Jumlah total pendapatan	Rp. 0,00
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 0,00

**I.4. Subsektor Restoran**

Jumlah tempat penyediaan konsumsi	15 Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. 10.000.000.000,00
Biaya antara lainnya	Rp. 500.000.000,00
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. 225.000.000,00

**J. Sektor Bangunan/Konstruksi**

Jumlah bangunan yang ada tahun ini	10 unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. 750.000.000,00
Total nilai bangunan yang ada	Rp. 2.780.000.000,00
Biaya antara lainnya	Rp. 250.000.000,00

**K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

<b>K.1. Subsektor Bank</b>	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. 0,00
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
<b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2 Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	2 Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. 500.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 50.000.000,00
<b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	20 unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. 1.000.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 50.000.000,00
Biaya lainnya	Rp. 10.000.000,00
<b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>	
Jumlah perusahaan jasa	2 Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 1.000.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 100.000.000,00
Biaya lainnya	Rp. 20.000.000,00
<b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>	
<b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	15 unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
<b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	3 jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 1.000.000.000,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 200.000.000,00
<b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	2 jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 500.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 100.000.000,00
<b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	4 jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 2.000.000.000,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 400.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 100.000.000,00
<b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	
<b>M.1. Subsektor Angkutan</b>	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	5 Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	35 Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 1.200.000.000,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 500.000.000,00
<b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>	
<b>N.1. Subsektor Listrik</b>	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	0 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 0,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 0,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
<b>N.2. Subsektor Gas</b>	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
<b>N.3. Subsektor Air Minum</b>	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	5 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 1.000.000.000,00
Nilai produksi air minum	Rp 50.000.000,00
Nilai transaksi air minum	Rp 100.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 100.000.000,00
<b>IV. PENDAPATAN PERKAPITA</b>	
<b>A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha</b>	
<b>A.1. Pertanian</b>	
1. Jumlah rumah tangga	47 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	200 orang

3. Jumlah rumah tangga buruh tani	10 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	51 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 4.000.000,00
<b>A.2. Peternakan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	19 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	82 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	2 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	11 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 6.000.000,00
<b>A.3. Perikanan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	3 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	10 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	2 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	8 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 6.000.000,00
<b>A.4. Kerajinan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	10 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	50 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	15 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	40 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 3.000.000,00
<b>A.5. Industri kecil, menengah dan besar</b>	
1. Jumlah rumah tangga	400 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	800 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	100 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	400 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 6.000.000,00
<b>A.6. Jasa dan perdagangan</b>	
1. Jumlah rumah tangga	350 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	800 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	50 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	150 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 4.000.000,00
<b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>	
Jumlah Kepala Keluarga	1162 KK
Jumlah Anggota Keluarga	3296 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 5.000.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 4.000.000,00
<b>V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR</b>	
<b>1. Sektor Pertanian</b>	
Petani	35 orang
Buruh Tani	19 orang
Pemilik Usaha Tani	36 orang
<b>2. Sektor Perkebunan</b>	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	4 orang
Buruh perkebunan	4 orang
Pemilik usaha Perkebunan	1 orang
<b>3. Sektor Peternakan</b>	
Peternakan Perorangan	10 orang
Buruh Usaha Peternakan	20 orang
Pemilik Usaha Peternakan	7 orang
<b>4. Sektor Perikanan</b>	
Nelayan	1 orang
Buruh Usaha Perikanan	2 orang
Pemilik Usaha Perikanan	5 orang
<b>5. Sektor Kehutanan</b>	
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
<b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang
<b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>	
Montir	18 orang
Tukang batu	0 orang
Tukang kayu	20 orang
Tukang sumur	20 orang

Tukang jahit	8 orang
Tukang kue	45 orang
Tukang anyaman	0 orang
Tukang rias	8 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	8 orang
<b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>	
Karyawan perusahaan swasta	416 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	20 orang
Pemilik perusahaan	2 orang
<b>9. Sektor Perdagangan</b>	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	150 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	50 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	150 orang
<b>10. Sektor Jasa</b>	
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	2 orang
Kontraktor	2 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	12 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	97 orang
Pegawai Negeri Sipil	81 orang
TNI	5 orang
POLRI	14 orang
Dokter swasta	3 orang
Bidan swasta	1 orang
Perawat swasta	6 orang
Dosen swasta	5 orang
Guru swasta	65 orang
Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	5 orang
Seniman/artis	2 orang
Sopir	26 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	2 orang
<b>VI. PENGUSAHAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT</b>	
<b>A. ASET TANAH</b>	
Tidak memiliki tanah	1980 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	1257 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	54 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	5 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	0 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	0 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	0 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	3296 orang
<b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>	
Memiliki ojek	60 orang- 60 unit
Memiliki becak	19 orang- 0 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki bus	2 orang- 2 unit
Memiliki mini bus	55 orang- 55 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
<b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>	
Memiliki penggilingan padi	2 orang
Memiliki traktor	5 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	2 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	15 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	25 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	20 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	64 orang
<b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>	
Tembok	1070 rumah
Kayu	3 rumah
<b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>	
Keramik	843 rumah
Semen	230 rumah
Kayu	0 rumah

Tanah	0 rumah
<b>RUMAH MENURUT ATAP</b>	
Genteng	1061 rumah
Seng	3 rumah
Asbes	8 rumah
Kayu	0 rumah
<b>VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA</b>	
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	1130 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	2115 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal barang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki helikopter	0 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	2 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	20 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	1223 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga	2 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito	50 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	1100 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	2 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	52 Keluarga
<b>VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>	
<b>A. Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	182 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	5 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	296 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	484 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	25 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	150 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	506 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	142 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	150 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	898 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	11 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	6 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	17 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	15 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	54 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	45 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	297 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	6 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	18 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	15 orang
<b>B. Wajib belajar 9 tahun</b>	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	429 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	429 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
<b>C. Rasio Guru dan Murid</b>	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	30 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	187 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	25 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	317 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	15 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	145 orang
7. Jumlah guru SLTA/ sederajat	15 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	160 orang
9. Jumlah siswa SLB	7 orang
10. Jumlah guru SLB	2 orang
<b>D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat</b>	
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	2 unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	2 unit
Jumlah perpustakaan keliling	1 unit
Jumlah sanggar belajar	0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	5 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang

Jumlah kelompok belajar Paket C	4 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	2 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	35 orang
<b>IX. KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
<b>A. Kualitas Ibu Hamil</b>	
Jumlah ibu hamil	30 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	8 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	12 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	2 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	8 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	30 orang
Jumlah ibu nifas	30 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	30 orang
<b>B. Kualitas Bayi</b>	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	32 orang
Jumlah bayi lahir mati	1 orang
Jumlah bayi lahir hidup	31 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	1 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
<b>C. Kualitas Persalinan</b>	
<b>Tempat Persalinan</b>	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	0 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	0 unit
Tempat persalinan Puskesmas	1 unit
Tempat persalinan Polindes	1 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	2 unit
Tempat praktek dokter	2 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
<b>Pertolongan Persalinan</b>	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	2 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	24 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	3 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
<b>D. Cakupan Imunisasi</b>	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	10 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	10 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	6 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	6 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	8 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	8 orang
Jumlah bayi 9 bulan	8 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	8 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	32 orang
<b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>	
<b>Pasangan Usia Subur</b>	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	170 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	919 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	650 pasangan
<b>Keluarga Berencana</b>	
Jumlah akseptor KB	650 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	250 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	100 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	56 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	50 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	185 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	9 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	0 orang
<b>F. Wabah Penyakit</b>	
<b>Muntaber</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian

Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Demam berdarah</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	2 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Kolera</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Polio</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Cikungunya</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	1 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Flu burung</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Busung lapar</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Kelaparan</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>Ispa</b>	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	0 kejadian
Jumlah yang meninggal	0 kejadian
<b>G. Angka Harapan Hidup</b>	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	73,18 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	73,17 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	70,80 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	73,40 Tahun
<b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>	
1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	200 Keluarga
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	400 Keluarga
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	500 Keluarga
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga
Total jumlah keluarga	1.100 Keluarga
<b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>	
Kebiasaan buang air besar	
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	1.083 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	10 Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	0 Keluarga
<b>Pola makan</b>	
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Tidak
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak
<b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>	
Dukun Terlatih	Tidak ada
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Sedikit
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Tidak ada
Paranormal	Tidak ada
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit
Tidak diobati	Tidak ada
<b>J. Status Gizi Balita</b>	
Jumlah Balita	153 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang
Jumlah Balita bergizi baik	153 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	0 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang

<b>K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini</b>		
Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
HIV/AIDS	1 orang	Puskesmas
TBC	1 orang	Rumah
<b>L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat</b>		
Jumlah MCK Umum	20 unit	
Jumlah Posyandu	6 unit	
Jumlah kader Posyandu aktif	30 orang	
Jumlah pembina Posyandu	2 orang	
Jumlah Dasawisma	3 Dasawisma	
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	10 orang	
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	5 orang	
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	2 orang	
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	10 jenis	
Jumlah kegiatan Posyandu	2 jenis	
Jumlah kader kesehatan lainnya	26 orang	
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	0 jenis	
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	2 jenis	
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	2 jenis	
Lainnya	1 jenis	
<b>X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>		
<b>A. Konflik SARA</b>		
Kasus konflik pada tahun ini		0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini		0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga		0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW		0 kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli		0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain		0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah		0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah		Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah		0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan		0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan		0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah		0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik		0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik		0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik		Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara		0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara		0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara		0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara		0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara		0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara		0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum		0 orang
<b>B. Perkelahian</b>		
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini		0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa		0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah		0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material		0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum		0 orang
<b>C. Pencurian</b>		
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini		0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat		0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat		0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api		0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum		0 orang
<b>D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah</b>		
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat		0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat		0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat		0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum		0 orang
<b>E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan</b>		
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi		0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini		0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan		0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang		0 orang
<b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>		
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras		0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras		0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras		0 kasus

Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
<b>G. Prostitusi</b>	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
<b>H. Pembunuhan</b>	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
<b>I. Penculikan</b>	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
<b>J. Kejahatan seksual</b>	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 unit
<b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	8 orang
Jumlah orang cacat fisik	2 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	1 unit
Jumlah panti asuhan anak	1 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	0 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang
Jumlah janda	0 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
<b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus

<b>M. Teror dan Intimidasi</b>	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus
<b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>	
Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	14 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	0 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	0 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	0 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	0 Pos
<b>XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT</b>	
<b>A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara</b>	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	14 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	14 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	14 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	14 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	12 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	12 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
<b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	1316 orang
Target PBB	Rp 569.330.564,00
Realisasi PBB	98,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
<b>C. Partisipasi Politik</b>	
<b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	2159 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	1965 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	15 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	4 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	25 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	4 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	1965 pemilih
<b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	2159 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	1965 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	1965 pemilih

<b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	0 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung
<b>4. Pemilihan BPD</b>	
Jumlah anggota BPD	0 orang
Penentuan anggota BPD	
Pimpinan BPD	
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa 0 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 0 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 0 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 0 kali
<b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	Keputusan Kepala Desa
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	34 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	0 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	2 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	34 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	0,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi
<b>C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	
<b>1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan</b>	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	35 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	100,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	100,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	100,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	35,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	85,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPP-Desa	80,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	50,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	5 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPDK)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada

Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	5 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	5 . kegiatan
<b>2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan</b>	
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	80,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	50,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	14 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	75,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	75,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	25,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikordinasikan pemerintah desa/kelurahan	5 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	5 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	14 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	4 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	0 kegiatan
<b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>	
Jumlah kelompok arisan	23 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	5 orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
<b>4. Adat Istiadat</b>	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Tidak
<b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	0
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
<b>Etos Kerja Penduduk</b>	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	0
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0

Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	0
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	0
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	2
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0
<b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis
<b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>1. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Ada</b>
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	5
Jumlah kegiatan	10 Jenis
<b>2. Lembaga Adat</b>	<b>Ada</b>
Kepengurusan	Ada dan Aktif
Buku Administrasi	3
Jumlah kegiatan	1 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
<b>XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>	
<b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 1.367.276.116,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 1.367.276.116,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 0,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00
<b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>	
Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	5 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	3 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	4 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	4 kasus
<b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
<b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	8 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Tidak Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Ada
<b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	2 buah
Jumlah meja	19 buah
Jumlah kursi	219 buah
Jumlah almari arsip	15 buah
Komputer	5 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	4 unit

<b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah Kas Desa	Tidak Ada
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Tidak Ada
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada dan Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Mutasi Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Tidak Ada
Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Kas Umum	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Terisi
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Ada dan Terisi
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
<b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
<b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
<b>2.B. Administrasi BPD</b>	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
<b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	0
Alat tulis kantor	0
Barang inventaris	0 Jenis
Buku administrasi	0 Jenis
Jenis kegiatan	0 Jenis
Jumlah pengurus	0 Orang
Jumlah ruang kerja	0 Ruang
<b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	
<b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	2 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	2 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	3 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	1 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
<b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis

Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	jenis
<b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	kasus
<b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	4 kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	4 kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	5 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	4 kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	5 kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	4 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	6 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	8 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	8 kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	2 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	8 kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	5 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	4 kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	4 kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	4 kali
<p>KOTA BLITAR, 12 Desember 2023 REMBANG Kecamatan Sananwetan Kota KOTA BLITAR</p> <p><u>YULIAN NURDIN AHMAD,S.IP,M.AP</u> Lurah</p> <p>Tembusan : 1. Camat Sananwetan 2. Walikota KOTA BLITAR 3. Arsip</p>	